

MULTIPLIER EFEK INDUSTRI KREATIF TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT BANYUWANGI

Muhamad Annas⁽¹⁾, M. Alaika Nasrulloh, Muh. Harun Al Rosid dan Lilit Biati

Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Blokagung

⁽¹⁾ Email : annas.muhamad@yahoo.co.id

INTISARI

Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergik, karena memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai bidang terutama bidang industri kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi effect yang ditimbulkan dengan adanya Industri Kreatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Banyuwangi, (2) Menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan Industri Kreatif, (3) Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pengembangan Industri Kreatif. Industri kreatif sebagai pendukung sektor pariwisata merupakan multisektor yang mencakup berbagai kegiatan perekonomian. Keterkaitan industri kreatif dengan berbagai sektor ekonomi dapat mendorong laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Kegiatan pariwisata akan menimbulkan permintaan (demand) akan barang dan jasa sehingga akan merangsang pertumbuhan produksi indsutri kreatif. Semakin banyak permintaan wisatawan maupun industri pariwisata, maka akan dapat semakin membangunkan produktifitas sektor-sektor ekonomi lainnya. Peranan industri kreatif sebagai pendukung sektor perekonomian di Kabupaten Banyuwangi menjadi topik yang penting untuk dibahas. Sektor ini di harapkan mampu memberikan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Banyuwangi. Sebagai daerah yang sedang mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu alternatif pembangunan. Melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui seberapa besar industri kreatif dan ekonomi kreatif mampu menarik pertumbuhan sektor-sektor perekonomian lainnya.

Kata Kunci : , Industri Kreatif, Ekonomi Kreatif, Angka Pengganda

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi daerah yang dapat dikembangkan, seperti sektor pariwisata dan industri kreatif yang berbasis agroindustri, misalnya kerajinan sabut kelapa, kerajinan anyaman bambu dan sebagainya. Industri kreatif berbasis agroindustri di Kabupaten Banyuwangi mempunyai prospek yang menjanjikan karena sebagian besar hasil produksi mampu di ekspor ke luar negeri melalui Bali maupun langsung ke Negara tujuan.(Martosudirjo, 2003:105).

Dalam lima tahun terakhir, sektor pariwisata di Banyuwangi memang terus menggeliat. Kunjungan wisatawan nusantara melonjak 161 persen dari 651.500 orang (2010) menjadi 1.701.230 orang (2015). Adapun wisatawan mancanegara meningkat 210 persen dari kisaran 13.200 (2010) menjadi 41.000 (2015). Data wisatawan ini diverifikasi dari hotel dan pengelola destinasi wisata. Geliat bisnis dan pariwisata juga ditunjukkan lewat lonjakan jumlah penumpang di Bandara Blimbingsari Banyuwangi yang mencapai 1.308 persen dari hanya 7.826 penumpang (2011) menjadi 110.234 penumpang (2015). Pariwisata juga ikut menggerakkan ekonomi warga. Pendapatan per kapita Banyuwangi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melonjak 62 persen dari Rp 20,8 juta (2010) menjadi Rp 33,6 juta per kapita per tahun (2014).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan empat strategi kunci pariwisata di Kabupaten Banyuwangi : **Pertama**, menjadikan daerah sebagai "produk" yang mesti dipasarkan potensi wisatanya. "Birokrasi tidak hanya menjadi pelayan publik dalam keseharian, tapi juga bersama-sama pemangku kepentingan yang lain ikut mempromosikan wisata. **Kedua**, memilih strategi pemasaran yang tepat. Banyuwangi menawarkan petualangan dan pengalaman yang berbeda dengan daerah lain. Petualangan untuk wisata alam, sedangkan pengalaman adalah untuk wisata budaya dan wisata kegiatan lewat Banyuwangi Festival. **Ketiga**, inovasi berkelanjutan. Seperti membuat ikon dan destinasi baru, di antaranya pembangunan bandara berkonsep hijau yang tahun ini tuntas. Selanjutnya pengembangan Grand Watudodol dan rumah apung di kawasan Bangsring, sinergi dengan BUMN membangun dermaga kapal pesiar di Pantai Boom, dan sebagainya. Inovasi juga dilakukan dengan pemasaran menggunakan aplikasi di "smartphone" atau telepon pintar. **Keempat**, pengelolaan pariwisata kegiatan lewat Banyuwangi Festival yang memperkenalkan potensi lokal kepada publik luar sekaligus menarik kunjungan wisatawan. "Banyuwangi Festival digelar sejak 2012. Ini ajang festival berbasis wisata alam, budaya, dan olahraga yang berlangsung setahun penuh. Dalam setahun ada sekitar 53 kegiatan wisata.

Beberapa pelaku usaha Industri Kreatif di Kabupaten Banyuwangi, seperti Handicraft di Kabat dan Rogojampi, Batik di Cluring mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Bahkan di Kecamatan Rogojampi mempunyai Kelompok Usaha Bersama khusus Ekonomi Kreatif dalam industri pariwisata yang menampung sebagian besar hasil kerajinan penduduk setempat. Hal ini memberikan dampak terhadap penurunan angka pengangguran, khususnya di sentra industri kreatif karena mempunyai pekerjaan sambilan bagi penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan dan sebagai pekerjaan tetap bagi penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan di luar usaha tersebut. Dengan demikian, pengembangan industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi akan memberikan dampak yang besar baik bagi penduduk setempat maupun terhadap pembangunan regional kabupaten Banyuwangi secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan indsutri kreatif di Kabupaten Banyuwangi mampu menggerakkan sektor-sektor lain untuk tumbuh dan berkembang baik secara langsung maupun tidak langsung (*multiplier effect*) atau memberikan dampak, baik dari segi ekonomi maupun di bidang sosial masyarakat setempat dan juga daerah sekitar sentra industri kreatif memberikan tetesan ke bawah di daerah sekitar industri tersebut (*trickle down effect*) sehingga pada akhirnya ikut mendorong pelaksanaan pembangunan regional.

B. Rumusan masalah

Permasalahan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Industri Kreatif membawa *multiplier effect* di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Banyuwangi?
3. Apa faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan upaya pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Banyuwangi?

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan

Konsep dan arti pembangunan tergantung pada siapa yang memahaminya, tetapi dilihat dari tujuannya, pemahaman makna pembangunan akan tetap sama yaitu "...an increasing attainment of one's cultural values" (Misra, 1981) yang dipandang sebagai pemaknaan riil dari pembangunan (*the real meaning of development*) dan tergantung dari kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga pemahaman tersebut dapat dijelaskan dalam kondisi sebagai berikut (dalam Wirutomo, dkk, 2003:5). *Pertama*, bahwa pembangunan

adalah sebuah proses bukanlah keadaan. *Kedua*, bahwa pada akhirnya proses tersebut tidak bebas nilai. *Ketiga*, bahwa nilai-nilai tersebut mengacu kepada tempat dimana masyarakat berada bukan pada nilai-nilai dunia Barat. Sementara David C. Korten (2001), menjelaskan bahwa diperlukan reorientasi visi pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ke visi pembangunan yang berpusat pada rakyat (dalam Wirutomo, dkk, 2003:45-46). Korten (1991:67), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang di dalamnya anggota masyarakat bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk menggerakkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia demi menciptakan mutu kehidupan mereka secara berkesinambungan dan adil, sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Dimock, Dimock dan Koenig (1960:538), mengartikan pembangunan sebagai proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik, Kartasasmita (1997:48) menyebutkan bahwa pembangunan membutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang diartikan oleh Kartasasmita (1997) sebagai tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Kartasasmita (1997:49) juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan mencakup beberapa unsur pokok seperti tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam pembangunan melalui berbagai pilihan alternatif yang tersedia serta jangka waktu untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan mencakup antara lain:

1. Masalah-masalah yang dihadapi dalam membuat perencanaan pembangunan yang mantap.
2. Modal dan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan pembangunan serta pengalokasiannya.
3. Kebijakan-kebijaksanaan untuk melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditentukan.
4. Orang, organisasi atau badan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

B. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Masyarakat mulai akrab dengan industry rumahan (*home industry*) yang menjual ide kreatif untuk menghasilkan pendapatan. Para pakar ekonomi menyebutnya dengan istilah “ekonomi kreatif”, yakni sebuah “talenta” (baru) yang mengubah kehidupan masyarakat melalui ide/gagasan kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan lebih sejahtera. Kata “talenta” sendiri memiliki banyak definisi atau pengertian. Menurut Webster’s New World Dictionary (1991: 1365), *talent* – dalam bahasa Inggris kuno (*Old English*): *talente*, dalam bahasa Latin: *talentum*, dan dalam bahasa Yunani: *talanton*. Merupakan kata benda yang diartikan sebagai: 1 any of various large units of weight or of money (the value of a talent weight in gold, silver, etc.) used in ancient Greece, Rome, the Middle East, etc. 2 any natural ability or power; natural endowment 3 a superior, apparently natural ability in the arts or sciences or in the learning or doing of anything 4 people collectively, or a person, with talent [to encourage young talent].

Sedangkan Ekonomi kreatif dimulai ketika pada tahun 1995 di London, Landry dan Bianchini merilis ide kreatif mereka dalam buku *The Creative City*. Landry mengemukakan ide yang menggugah para kepala daerah (walikota) dan pemangku kepentingan pembangunan ekonomi-budaya melalui bukunya, *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. Konsep yang ditawarkan adalah “Kota Kreatif” (*creative city*). Diawal risetnya, Florida (2012) menyampaikan hasil studi tentang transformasi produk-produk perekonomian,

industry kreatif, dan bangkitnya kelas kreatif (*The Rise of Creative Class*). Dinyatakan pula bahwa perekonomian dunia telah mengalami pergeseran. Bila pada abad XX, ekonomi bertumpu pada produk manufaktur, maka saat ini telah mengalami pergeseran ke ekonomi yang bersumber dari kreativitas sebagai komoditas utamanya di abad XXI.

Di sisi lain, memasuki milenium kedua, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda dimulainya era desentralisasi (baca: otonomi daerah). Otonomi daerah bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penyediaan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera.

C. Konsep *Multiplier Effect*

Definisi *multiplier effect* yang dijelaskan oleh Frechtling (1994), Tarigan (2002), Moretti (2010) dan Domanski & Gwosdz (2010), bahwa *multiplier effect* dalam pengembangan ekonomi lokal merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan pembangunan. Dengan demikian, dari pendapat para ahli tersebut maka *multiplier effect* dalam pembangunan ekonomi dapat disederhanakan ke dalam dua bidang yaitu di bidang ekonomi dan sosial.

a. Bidang ekonomi

Multiplier effect di bidang ekonomi dapat dilihat dari PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat, kemampuan menciptakan atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat (Domanski & Gwosdz, 2010:30), serta adanya keterkaitan antar sektor terkait yang diakibatkan oleh adanya penambahan permintaan terhadap produksi di sektor tertentu (Tarigan, 2002:253). Sementara Abegunde (2011:254) menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi, khususnya perkembangan industri di suatu daerah akan memberikan *spread effect* yaitu adanya transmisi rekrutmen dan perpindahan pekerja yang dibeli oleh industri tersebut sehingga mempengaruhi pendapatan personal dari masyarakat tersebut. hal tersebut memberikan efek negatif bagi daerah yang ditinggalkan. Efek negatif dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam pengembangan industri tertentu akan menimbulkan adanya persaingan yang ketat (Marshall, 1920:404).

b. Bidang sosial

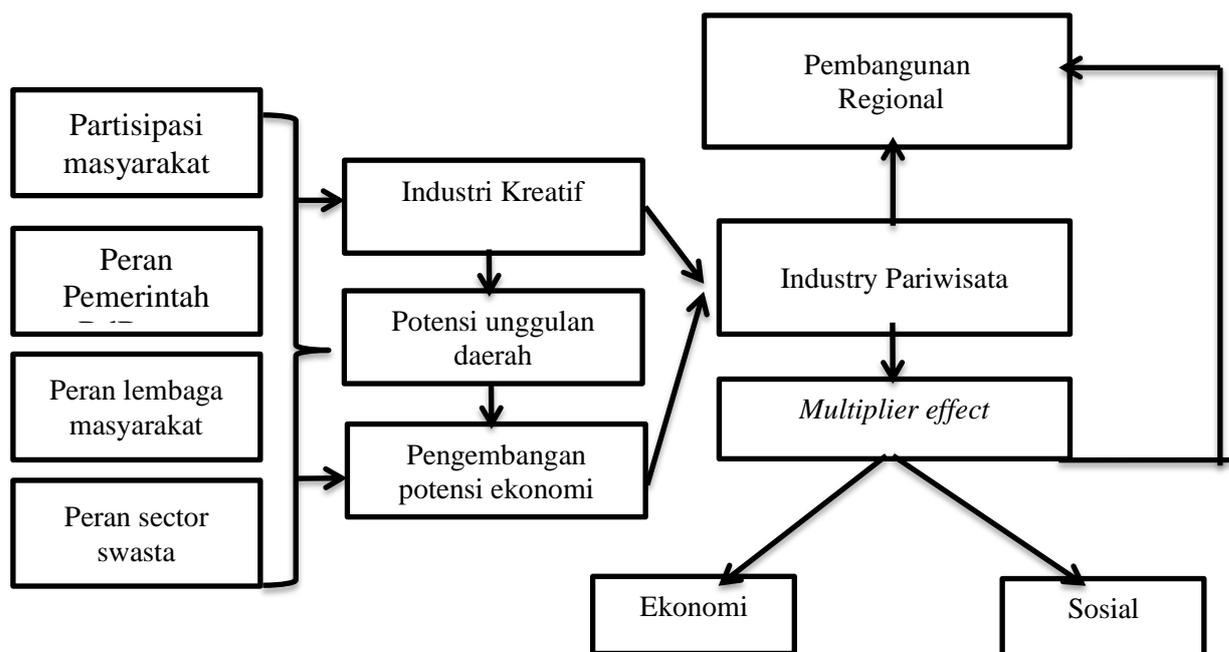
Dampak di bidang sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu mempengaruhi tingkat kemiskinan atau taraf hidup masyarakat setempat, solidaritas masyarakat setempat, pelayanan terhadap masyarakat seperti kemudahan mengakses pendidikan dan kesehatan kemudian juga infrastruktur yang mendukung. Ghalib (2005:99) mengemukakan bahwa dalam ekonomi regional, keterkaitan wilayah menjadi faktor yang sangat penting dan infrastruktur jalan merupakan pengikat ke wilayah luar (*Interregional Connections*) maupun antar subwilayah (*Intraregional Connections*), guna memecahkan masalah surplus dan defisit produksi diantara wilayah. Sementara Jamieson, Goodwin and Edmuns (2004) dalam mengkaji pembangunan ekonomi melalui pengembangan pariwisata menyatakan bahwa pengembangan ekonomi akan dapat mengurangi adanya kemiskinan. Lebih jauh Jamieson, Goodwin and Edmuns (2004) menyatakan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi akses terhadap layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah sehingga akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan beban bagi pemerintah daerah.

Sementara Ravallion (2001), DaGdeviren, H., R. Van der Hoeven, and J. Weeks (2004) yang dikutip oleh Gerdien Meijerink & Pim Roza (2007) mengungkapkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dengan kemiskinan dan dampak yang ditimbulkan lainnya sebagai berikut. Di sisi lain, Marshall (1920) mengungkapkan adanya efek negatif di

bidang sosial dengan adanya industri di suatu daerah yang menjadikan penduduk menjadi konsumtif untuk membelanjakan pendapatan personal serta kualitas lingkungan hidup yang akan terancam dengan adanya pengeksploitasian bahan baku secara besar-besaran (Marshall, 1920:39-47).

D. Alur Pikir Penelitian

Penelitian ini mempunyai alur pemikiran yang didasarkan dan disesuaikan dengan kerangka pemikiran yang telah dipakai oleh penulis. Alur pikir penelitian menjelaskan peran aktor-aktor dalam pembangunan guna mengembangkan potensi industri kreatif sebagai salah satu potensi unggulan daerah. Melalui pengembangan industri kreatif dan event festival ini akan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan regional di Kabupaten Banyuwangi. Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur pikir Penelitian
Sumber : Hasil olahan peneliti

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mencari pemahaman tentang *multiplier effect* yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan potensi ekonomi daerah dan mengkaji peran pemerintah daerah yang terkait dalam upaya pengembangan potensi yang telah ada agar mampu mendukung kegiatan pembangunan daerah setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan survey.

B. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini melalui pengumpulan data dari studi kepustakaan, *existing statistic*, studi lapangan, dan wawancara mendalam.

1. Studi kepustakaan dengan mencari sumber-sumber dari buku teks, artikel, jurnal, media elektronik, majalah dan sumber-sumber lain yang terkait.
2. *Existing statistic*, yaitu melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan Industri Pertambangan, Dinas

Pariwisata, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Bidang Ekonomi.

3. Observasi dilakukan untuk mengetahui sentra lokasi pengembangan potensi ekonomi lokal di Kabupaten Banyuwangi, khususnya sentra lokasi industri kreatif dan pemasarannya serta pelaku event festival wisata di Kabupaten Banyuwangi.
4. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan UMKM dan IKM industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi, seperti Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat pelaku industri kreatif maupun asosiasi-asosiasi atau lembaga-lembaga yang terbentuk untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang menangani industri kreatif dan pelaku event festival di Kabupaten Banyuwangi. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan semi terstruktur yang telah disusun peneliti terkait kajian penelitian sehingga informan mampu menjawab secara bebas dan masih terbatas pada bidang kajian penelitian.

C. Informan

Informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Perwakilan Dinas Koperasi, UMKM, Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu wawancara yang berkaitan dengan dukungan dari pemerintah daerah terhadap industri kreatif dan pelaku event festival baik bantuan-bantuan secara langsung maupun strategi dalam pengembangan potensi ekonomi tersebut yang pada akhirnya akan memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan regional di Kabupaten Banyuwangi.
2. Perwakilan pelaku usaha industri kreatif dan event festival di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan yang diterima penduduk setempat serta proses pemasarannya.
3. Perwakilan anggota Asosiasi industri kreatif dan event festival di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui pelaksanaan usaha yang telah digerakkan sehingga memberikan segi kebermanfaatannya bagi penduduk setempat yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan regional di Kabupaten Banyuwangi.
4. Perwakilan pembina Asosiasi industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui strategi dan dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha maupun asosiasi sehingga mampu meningkatkan permintaan terhadap produk – produk industri kreatif.
5. Perwakilan jurnalis dari salah satu media massa yang memantau keberadaan industri kreatif dan event festival di Kabupaten Banyuwangi.

D. Batasan penelitian

Penelitian mengenai *multiplier effect* dalam pengembangan potensi ekonomi melalui industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi memiliki batasan hanya melibatkan ruang lingkup di Kabupaten Banyuwangi sehingga informan yang menjadi narasumber merupakan informan yang berada di dalam Kabupaten Banyuwangi dan mengetahui tentang kajian penelitian yang sedang diteliti. Batasan-batasan penelitian ini mencakup beberapa hal.

- a. Obyek Penelitian adalah industri kreatif dan event festival di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Keterlibatan aktor-aktor pembangunan khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Banyuwangi meliputi peran pemerintah, peran sektor swasta dan peran masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
- c. *Multiplier effect* pengembangan potensi ekonomi dalam pembangunan regional di Kabupaten Banyuwangi, hanya mencakup bidang ekonomi dan sosial.

E. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di sentra lokasi industri kreatif di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi yaitu Kecamatan Licin dan Kecamatan Kabat, Kecamatan Cluring dengan beberapa alasan berikut.

- a. Kecamatan Licin khususnya Desa Banjar merupakan salah satu kecamatan yang merupakan daerah sentra lokasi industri kreatif yang mempunyai produk unggulan di bidang kuliner, terletak di jalan jalur wisata Ijen di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kecamatan Cluring khususnya Desa Tampo merupakan salah satu kecamatan yang merupakan sentra utama industri kerajinan batik dan industri kerajinan lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Namun, di daerah tersebut baru mengembangkan kerajinan batik.
- c. Kecamatan Kabat khususnya Desa Tambong, merupakan salah satu desa di Kecamatan Kabat yang sudah mengembangkan handycraft yang terbuat dari bambu dan sabut kelapa, produk produk desa ini sudah merambah ke pasar ekspor.

PEMBAHASAN

A. Multiplier Effect Pengembangan Industri Kreatif Melalui UMKM dan IKM dalam Pembangunan Regional Kabupaten Banyuwangi

IKM dan UMKM memberikan efek baik positif maupun negatif dalam perekonomian masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya IKM dan UMKM di Kabupaten Banyuwangi telah memberikan dampak di bidang ekonomi maupun sosial. Industri kerajinan Batik telah memberikan dampak di bidang ekonomi yang terdiri dari adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru, adanya peningkatan pendapatan masyarakat, adanya peningkatan PDRB, menggerakkan sektor-sektor lainnya yang ikut berpengaruh dan timbulnya persaingan usaha yang ketat. Sementara di bidang sosial, efek yang ditimbulkan terdiri dari adanya penguatan solidaritas masyarakat, penurunan angka kemiskinan, dan perilaku konsumtif.

1. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, industri kerajinan handycraft, batik, kuliner mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang berupa penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, industri dari IKM dan UMKM mampu memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, di sektor lain di luar sektor IKM UMKM, secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan sektor perdagangan, jasa dan sektor pertanian. Sementara keberadaan IKM dan UMKM di Kabupaten Banyuwangi juga telah menciptakan persaingan usaha yang ketat.

2. Penciptaan lapangan pekerjaan baru

IKM dan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat. Penyerapan tenaga kerja di daerah setempat yang paling banyak adalah oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai salah satu bentuk kerja sambilan dan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarganya. Seperti pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Khotibin salah satu pelaku usaha yang bertindak sebagai pengepul dalam industri kerajinan bambu dan batok kelapa di Desa Tambong Kecamatan Kabat, pada 7 Desember 2016 bahwa industri kerajinan bambu dan batok kelapa di Desa Tambong sangat potensial dan telah berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di desa tersebut. Senada dengan pernyataan dari Dinas Koperasi dan UMKM juga menyatakan hal yang hampir serupa bahwa keberadaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja bagi penduduk

setempat, menyatakan bahwa, “*Di Sentra-sentra itu hampir 80 persen di desa yang menghasilkan kerajinan*”

3. Peningkatan pendapatan masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh adanya keterbukaan lapangan pekerjaan di sentra-sentra industri kerajinan karena masyarakat lebih produktif dan mampu menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Industri kerajinan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5 orang per keluarga, dengan penghasilan sekitar 70 ribu dalam sehari sehingga dalam sebulan mencapai penghasilan sekitar 2 juta. Jika dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR) di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 1,1 juta untuk tahun 2015. Lebih lanjut Industri kerajinan anyaman bambu telah memberikan efek positif yang lebih dominan dalam peningkatan pendapatan masyarakat di daerah sentra lokasi kerajinan anyaman bambu di Desa Tambong, Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan bahwa industri kerajinan anyaman bambu telah mampu menciptakan produktivitas masyarakat di daerah sentra lokasi tersebut sehingga pada akhirnya masyarakat mempunyai penghasilan atas usaha kerajinan anyaman bambu tersebut.

4. Peningkatan PDRB

Secara tidak langsung industri kerajinan, batik dan kuliner telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyuwangi melalui penghitungan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kemudian dari segi pertanian, pun ikut berkontribusi dalam pembentukan PDRB kabupaten Banyuwangi mengingat bahwa produksi pertanian termasuk turut mendukung sebagai bahan baku. Perkembangan PDRB di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 sampai 2015 terlihat mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel Bappeda terlihat bahwa dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 32.463.822,6 juta rupiah. Selanjutnya jumlah PDRB atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami perkembangan sebesar 108,68 persen. Sementara PDRB pada tahun 2014 sampai 2015 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB Kabupaten Banyuwangi atas dasar harga berlaku mencapai 60.218.451, 8 juta rupiah dan mengalami perkembangan sebesar 311,22 persen. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (Bappeda, 2016).

Struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa sektor pertanian memberi kontribusi paling besar terhadap PDRB yakni 36,45 persen, termasuk di dalamnya adalah subsektor tanaman bahan makanan antara lain singkong, jagung dan kacang tanah, subsektor perkebunan antara lain kelapa, pandan dan tembakau, subsektor peternakan antara lain sapi, kambing dan unggas. Peranan beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi terhadap pembentukan total PDRB dapat dilihat pada Tabel Bappeda. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi dominan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2010 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi sebesar 35,54 atas harga berlaku. Walaupun terlihat bahwa pada tahun 2011 sektor pertanian mengalami penurunan yaitu menjadi 34,75 berdasarkan harga berlaku, sektor pertanian tetap memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor dari lapangan usaha lainnya yaitu sektor jasa-jasa, perdagangan, hotel dan rumah makan, serta industri pengolahan.

5. Peningkatan sektor-sektor lain yang ikut berpengaruh

Industri kerajinan batik, kuliner dan handicraft telah berkontribusi dalam menggerakkan sektor perdagangan, jasa dan pertanian. Di sektor perdagangan, Industri kerajinan melibatkan *buyer* atau pembeli untuk membeli hasil produksi kerajinan baik barang setengah kemudian disetorkan ke pengepul untuk di proses menjadi barang jadi.

Pembeli tersebut berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi, seperti Bali dan Jakarta dan sebagainya sehingga mengharuskan pengepul untuk mengirim produk kerajinan maupun kuliner yang telah dipesan dengan melalui jasa pengangkutan maupun online. Para pelaku usaha kerajinan batik menggunakan jasa pengangkutan secara pribadi dan sistem sewa. Seperti pernyataan yang diungkapkan dari hasil wawancara dengan Rina karyawan Batik Virdes pada 12 Desember 2016, bahwa selama ini untuk mengangkut hasil kerajinan batik menggunakan jasa sopir yang disewa sebagai tenaga kerja pelaku usaha tersebut. Sementara pembeli dari Bali kadangkala datang mengambil sendiri barang pesannya ke rumah pelaku usaha tersebut dan pengiriman produk hasil kerajinan batik dititipkan melalui ekspedisi dari Solo (Ririn, 2016).

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan jurnalis Radar Banyuwangi, Agus Baehaqi, pada 1 Nopember 2016 menyatakan bahwa selama ini belum ada keterpaduan antar sektor-sektor di Kabupaten Banyuwangi. Sektor-sektor yang ada lebih sering menjalankan program-program rutinitas yang telah disusun dan ditargetkan tanpa mempedulikan keterpaduan program dengan sektor lain. Namun masih ada keterpaduan antar sektor yang dapat dilihat di sektor industri dan perdagangan dan sektor koperasi dan UMKM, dimana kedua sektor tersebut merupakan bagian atau dinas yang bertujuan dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal termasuk kerajinan batik. Seperti pernyataan dari hasil wawancara dengan Syamsodin pada 30 November 2016 yang menyatakan bahwa keanggotaan AKRAB dalam upaya pengembangan potensi ekonomi tidak hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja, tetapi juga termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Bappeda bidang ekonomi dan sebagainya.

6. Terciptanya Persaingan Usaha yang Ketat

Industri kerajinan anyaman bambu, kerajinan batik dan kuliner di Kabupaten Banyuwangi telah menciptakan adanya pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan baik di Kecamatan Cluring, Rogojampi, Kabat, dan Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan sentra utama industri kerajinan tersebut yang tersebar di daerah tersebut. Namun, untuk persaingan lokal di Kabupaten Banyuwangi tidak mengancam pengusaha di Kabupaten Banyuwangi karena masing-masing pengusaha sudah mempunyai langganan pembeli masing-masing.

Sementara pesaing utama dalam industri kerajinan batik di Kabupaten Banyuwangi terletak pada pembeli yang juga merupakan langganan dari pengusaha industri kerajinan batik dari daerah lain. Seperti yang diungkapkan berdasarkan hasil wawancara pada 1 Desember 2016 dengan H. Moch Suyadi, pelaku usaha industri kerajinan batik di Desa Tampo, yang mengakui bahwa pesaing usaha untuk kerajinan batik berasal dari pelaku usaha di Solo, Madura dan Pekalongan.

Hal ini menuntut para pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi untuk mampu melakukan diversifikasi produk agar tetap disukai oleh konsumen, sehingga pada akhirnya para pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi mampu bertahan dan ataupun mampu memperluas daerah pemasarannya.

7. Bidang Sosial

Di bidang sosial *multiplier effect* pengembangan potensi Industri Kreatif yang menghasilkan berbagai kuliner, handycraft, batik dan berbagai macam produk kreatif lainnya dan di bina secara langsung oleh IKM dan UMKM dapat dilihat melalui solidaritas dan rasa kekeluargaan diantara masyarakat setempat, pengaruh Industri Kreatif terhadap angka kemiskinan penduduk, kualitas lingkungan hidup masyarakat, dan perilaku konsumtif masyarakat.

a. Solidaritas dan rasa kekeluargaan diantara masyarakat setempat

Keberadaan IKM dan UMKM dalam Program Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banyuwangi telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Hal ini menimbulkan efek positif yaitu adanya interaksi antar individu dalam masyarakat di desa tersebut dan menumbuhkan solidaritas yang kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan Disperindagtam Kabupaten Banyuwangi dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada 7 Desember 2016 yang menyatakan bahwa salah satu efek di bidang sosial dengan adanya IKM dan UMKM di desa setempat yaitu meningkatkan solidaritas dan kerukunan sehingga menciptakan rasa aman di desa tersebut.

b. Penurunan Angka kemiskinan

Angka kemiskinan akan mempengaruhi akses terhadap layanan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk tersebut. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dari 20,09% pada tahun 2010 menjadi 9,57 % pada tahun 2014, yang berarti selama kurun waktu empat tahun jumlah penduduk miskin hanya berkurang sebesar 10,52%. (Draft RPJMD 2011-2015). Terjadinya penurunan angka kemiskinan tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja baik di sektor pertanian, jasa, maupun industri. Industri kerajinan sebagai salah satu bagian dari sektor agroindustri yaitu sektor pertanian dan sektor industri juga telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran bagi penduduk setempat. Dengan adanya lapangan kerja bagi penduduk akan memberikan masukan atau pendapatan sehingga daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat akan mempengaruhi terhadap jumlah pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan terpenuhi. Hal tersebut berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat khususnya pada indikator pengukuran keberhasilan pembangunan melalui indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 sebesar 65,48 meningkat menjadi 67,80 pada tahun 2015. (Draft RPJMD 2011-2015).

c. Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat

Keberadaan industri kerajinan tidak menimbulkan efek negatif yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya proses daur ulang limbah terhadap limbah produksi kerajinan batik, untuk keperluan industri kerajinan batik secara terus menerus sehingga limbah yang dihasilkan dari proses kerajinan batik sudah tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Demikian juga limbah dari industry lain yang tingkat resikonya jauh lebih kecil karena tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya kegiatan produksi lain seperti pada saat menggunakan mesin jahit, itu akan menimbulkan sisa-sisa bahan baku yang tidak terpakai tidak hanya dari anyaman bambu saja tetapi juga bahan baku lain seperti karton, dan kain yang tidak dimanfaatkan dan akan mengakibatkan adanya sampah yang membutuhkan proses daur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Seperti yang diakui oleh Khotibin, dalam hasil wawancara yang dilakukan pada 1 Desember 2016, bahwa penggunaan mesin jahit yang digunakan tidak hanya anyaman bambu saja, melainkan juga menggunakan karton dan kain. Selain penggunaan mesin jahit, mesin lain yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja khususnya untuk industri kerajinan di Kabupaten Banyuwangi adalah mesin penyemprot cat dan pewarna batik

d. Perilaku Konsumtif Masyarakat

Industri kerajinan telah mampu menyerap tenaga kerja sehingga memberikan pendapatan masyarakat yang lebih baik. Hal ini juga telah meningkatkan daya beli masyarakat yang juga menimbulkan perilaku konsumtif bagi masyarakat setempat untuk membelanjakan penghasilan yang diperoleh.

8. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap *multiplier effect* dalam pengembangan potensi ekonomi melalui industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan bahwa industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi lebih memberikan efek positif di bandingkan efek negatif baik di bidang ekonomi maupun sosial. Di sisi lain, industri kerajinan di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh adanya infrastruktur daerah guna memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Aktivitas masyarakat dan pergerakan barang di Kabupaten Banyuwangi selama ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Industri kreatif tidak mempunyai pengaruh secara langsung dalam penyediaan sarana infrastruktur daerah di Kabupaten Banyuwangi karena penyediaan sarana infrastruktur daerah di Kabupaten Banyuwangi lebih ditujukan sebagai sarana penunjang dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sarana prasarana infrastruktur yang ada di Kabupaten Banyuwangi seperti ketersediaan jalan dan jembatan, perhubungan, sarana pelayanan dasar dan lain-lain.

a. Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan memiliki fungsi yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Keberadaan jalan menjadi kebutuhan mutlak untuk memfasilitasi terjadinya mobilitas orang dan barang, serta pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan Bappeda Kabupaten Banyuwangi, dilihat dari kondisinya, dari total panjang jalan Kabupaten Banyuwangi sebesar 2.932,35 kilometer, jalan dengan kondisi baik mencapai 60,99 persen, kondisi sedang 21,52 persen, rusak ringan 9,12 persen dan rusak berat 8,37 persen. Selain itu, saat ini terdapat 442 buah jembatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan bentang jembatan sangat bervariasi antara enam meter hingga seratus empat puluh meter. Sementara total panjang jembatan di Kabupaten Banyuwangi yaitu 4.939 meter. (Draft RPJMD 2011-2015). Sebagian besar kondisi jalan yang rusak ringan hingga rusak berat berada di pedesaan terutama daerah-daerah yang dekat dengan pantai dan pegunungan. Sentra utama industri kerajinan di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berada di daerah-daerah mudah yang diakses. Untuk menuju ke daerah pegunungan dimana kondisi jalan sebagian besar rusak dan sebagian lainnya belum diaspal. Hal ini telah mempersulit bagi para pelaku usaha industri kerajinan dalam memasarkan produk-produk kerajinan. Seperti di daerah Sempu dan Songgon yang mempunyai topografi tanah dan jalan yang berliku-liku dalam bentuk dataran tinggi atau pegunungan. Hal ini mengakibatkan terganggunya kegiatan arus ekonomi menuju daerah tersebut.

b. Perhubungan

Transportasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi sudah tersedia rute angkutan umum. Angkutan umum tersebut dilayani oleh bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perkotaan. Disamping itu juga tersedia travel, bus sewa dan bus pariwisata, Kereta Api, Angkutan Laut, dan Bandara. Sementara mobilitas atau transportasi barang, menggunakan truk, trailer, *pickup* dan truk box. Ketersediaan sarana angkutan umum sebagai bagian dan sarana pelayanan dasar ada di 24 Kecamatan berupa angkutan pedesaan. Kelancaran transportasi didukung oleh beberapa terminal yaitu dua buah terminal tipe A di Banyuwangi, tiga buah terminal tipe B di Genteng, Jajag, dan Rogojampi. Terminal tipe C di Banyuwangi, Muncar, Pesanggaran serta pendukung terminal, yaitu di Pasar kebondalem, Pasar Sempu, Pasar Songgon dan Pasar Purwoharjo. Sarana perhubungan

lainnya berupa telekomunikasi yang difasilitasi dengan telepon kabel dan telepon tanpa kabel. Berdasarkan data dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, pada tahun 2016, penggunaan telepon di Kabupaten Banyuwangi oleh pelanggan sudah menembus seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Berbagai dukungan sarana infrastruktur di atas sangat mempengaruhi kelancaran usaha industri kerajinan untuk memasarkan produk-produk kerajinan serta menjalin kerjasama dengan cara membangun interaksi antara *produsen, supplier*, eksportir dan pembeli melalui jaringan komunikasi. Tanpa adanya sarana infrastruktur baik yang berupa jalan, jembatan dan sarana perhubungan yang memadai akan mempersulit proses interaksi dalam kegiatan industri tersebut.

9. **Hambatan dan Kendala Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Banyuwangi**
Pelaksanaan berbagai program kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan upaya-upaya dalam pengembangan potensi ekonomi daerah, salah satunya melalui industri kerajinan. Namun, usaha pengembangan industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa kendala baik yang berasal dari pemerintah, pelaku usaha, maupun pihak swasta. Berbagai program pemerintah yang telah dibuat untuk menunjang industri kecil dan rumah tangga termasuk industri kreatif masih kurang mengena atau tidak tepat sasaran. Program-program dana bergulir, bantuan permodalan dari pemerintah, penyelenggaraan pameran-pameran, masih belum tepat sasaran dalam artian bahwa pelaksanaannya hanya pada sejumlah orang tertentu. Dana bantuan bergulir dan bantuan permodalan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang adanya sosialisasi dan juga adanya sikap sekelompok individu yang menyimpan informasi tersebut untuk kepentingan kelompok tersebut. Hambatan dan kendala dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal berikut.

B. Perencanaan vs. Pelaksanaan

Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kadangkala tidak terealisasi secara tepat oleh pengrajin. Perencanaan dan pelaksanaan sering menjadi persoalan, khususnya pada tingkatan pengrajin pada pemerintah. Hambatan dalam perencanaan versus pelaksanaan ini dapat dilihat dari visi dan misi yang dibuat melalui program yang telah direncanakan tetapi tidak terealisasi secara baik. Sementara untuk mengevaluasi perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah berhasil atau tidak dapat dilihat pada pelaksanaan yang telah dijalankan. Untuk mengetahui pelaksanaan berjalan dengan baik atau tidak harus dilakukan studi kasus terhadap objek yang menjadi sasaran. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum pernah melakukan penelitian mengenai potensi ekonomi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penentuan perencanaan selanjutnya, sehingga bantuan yang diberikan sering kali salah sasaran dan tidak berdaya guna.

1. Adanya visi dan misi yang telah dibuat dengan berbagai program yang telah direncanakan tetapi tidak direalisasikan secara tepat

Berbagai kebijakan yang telah dibuat sebagai salah satu tindakan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi salah satunya melalui pengembangan agroindustri melalui industri kreatif tidak direalisasikan secara tepat. Hal ini disebabkan sumber daya manusia dari pemerintah daerah yang kurang bisa menerima aspirasi dari para pengrajin, yang seharusnya pemerintah hanya memberikan fasilitas saja dan memberikan keleluasaan pengrajin untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa harus ada muatan politisnya. Seperti pada pelaksanaan forum diskusi yang pernah diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tetapi kurang efektif karena tidak ada tindak lanjutnya.

Sementara penyebab lain dalam pengimplementasian visi dan misi Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kebijakan-kebijakan tidak direalisasikan secara tepat adalah tidak adanya kesatupaduan dalam menjalankan rencana strategis yang dilakukan antar jajaran pemerintah atau dinas-dinas di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan oleh adanya program-program yang berbeda-beda antar dinas atau jajaran pemerintah, padahal sebenarnya tujuan yang ingin dicapai sama, bahkan programnya pun mirip. Namun, tidak ada kerjasama atau kesepahaman dalam menjalankan program tersebut di antara jajaran tersebut.

2. Belum pernah diadakannya penelitian mengenai potensi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama ini belum pernah mengadakan penelitian yang menganalisis dampak-dampak yang diakibatkan dengan adanya agroindustri termasuk industri kreatif. Padahal keberlangsungan agroindustri di Kabupaten Banyuwangi termasuk industri kreatif mempunyai dampak-dampak yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah agroindustri termasuk industri kreatif dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan menetapkan kebijakan tertentu atau kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dilapangan atau mengatasi dampak negatif yang ada dan mempertahankan dampak positif bila perlu mengembangkan usaha yang lebih baik agar mampu mencapai manfaat yang lebih besar lagi bagi penduduk atau masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menyatakan bahwa sampai saat ini pihak pemerintah daerah belum melakukan studi kasus untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini merupakan salah satu masukan yang tepat untuk mengetahui secara langsung bagaimana dampak-dampak yang diakibatkan dengan adanya industri tersebut sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam pengembangan potensi ekonomi daerah.

C. Pembangunan Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan penduduk atau masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan sarana prasarana sangat tergantung pada modal atau anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan terkait dengan ketergantungan pada investor luar untuk menangani proyek-proyek tersebut. Pembangunan prasarana menjadi prasyarat utama, dan menjadi pusat perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan regional. Pada kenyataannya, sarana prasarana di Kabupaten Banyuwangi masih mempunyai sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan bagi masyarakat setempat termasuk bagi para pelaku usaha industri kerajinan di Kabupaten Banyuwangi karena beberapa hal berikut.

1. Pembangunan prasarana (jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih) skala besar tidak terjadi karena keterbatasan sumber dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Baehaqi, jurnalis Radar Banyuwangi pada 1 Desember 2016 mengungkapkan bahwa selama ini anggaran pemerintah di Kabupaten Banyuwangi sangat terbatas sehingga untuk memberikan sarana prasarana bagi kepentingan publik masih sangat terbatas. Kondisi sarana prasarana di Kabupaten Banyuwangi terutama infrastruktur jalan di Desa masih banyak yang belum diaspal dengan kondisi jalan yang belum memadai, sehingga menjadi penghambat dalam kegiatan distribusi produk kerajinan ke daerah-daerah lain, terutama apabila terjadi hujan, ironisnya industri kerajinan umumnya di daerah pedesaan. Namun, untuk jalan utama antar kabupaten dan antar propinsi sudah bagus dan memadai. Seperti yang diungkapkan

dalam wawancara dengan Syamsodin pada 7 Desember 2016 yang menyatakan bahwa untuk kondisi jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten dan antar propinsi di Kabupaten Banyuwangi sudah baik dan aksesnya pun mudah.

D. Masalah Hubungan Pemerintah Daerah – Dunia Usaha

Dari pengamatan yang ada, pada umumnya hubungan antara Pemerintah daerah dengan dunia usaha masih kurang efektif. Bahkan ada *prejudice* dari masing-masing pihak. Beberapa fenomena umum sebagai berikut.

1. Kurang adanya interaksi yang positif antara pihak pemerintah daerah dengan pelaku usaha

Kondisi ini dapat dilihat dari sosialisasi yang masih belum diketahui oleh sejumlah masyarakat khususnya pengrajin akan informasi tertentu, seperti pemberian dana bantuan bergulir, pelaksanaan pameran, pelatihan dan kegiatan lain. Pada akhirnya sebagian pelaku usaha memberikan respon yang kurang terhadap pemerintah daerah, seperti ketika ada perwakilan dari pemerintah daerah yang ingin meminta data jumlah total produksi selama bulan tertentu tidak diberi bahkan menurut hasil wawancara dengan Kasi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan Disperindagtam Kabupaten Banyuwangi pada 30 November 2016, mengungkapkan bahwa selama ini pihak pemerintah daerah telah berusaha meminta kepada para pelaku usaha bahkan sampai datang ke sentra usaha hanya untuk meminta data jumlah total produksi tetapi kadangkala mereka menolak untuk memberikan data tersebut dengan berbagai alasan tertentu.

2. Kurangnya otoritas yang dimiliki oleh forum-forum dalam klaster-klaster industri termasuk klaster industri kreatif untuk mengambil keputusan tertentu

Forum-forum atau komite-komite yang ada tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan, karena selama ini kewenangan dalam mengambil keputusan berada di tingkat pemerintah daerah. Hal ini berakibat pada sulitnya mengambil pemecahan suatu masalah tertentu yang dihadapi oleh para pelaku usaha atau pengrajin. Selama ini, para pengrajin hanya diberikan untuk memberikan suatu usulan berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha di Desa Banjar, Syamsodin pada 7 Desember 2016, mengakui bahwa ada yang memberikan usulan-usulan mengenai pengembangan industri kreatif agar dapat terus bertahan dan berkembang, bahkan dapat bersaing di dunia internasional, tetapi usulan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sementara anggota forum klaster industri kreatif tidak mempunyai otoritas untuk mengambil tindakan lebih lanjut sebelum ada persetujuan dari pihak pemerintah daerah. Hal ini telah memberikan pandangan bagi sebagian pelaku usaha industri kreatif bahwa forum diskusi dan komunikasi dalam klaster industri kreatif kurang efektif. Akibat kurang efektifnya forum-forum komunikasi tersebut, menimbulkan adanya penurunan terhadap antusiasme di kalangan pengusaha industri kreatif dan para partisipan tersebut kehilangan minat dalam pengembangan ekonomi lokal. Pada akhirnya para pelaku usaha hanya berfokus pada pengembangan industri untuk kepentingan usahanya saja.

3. Diversifikasi atau Pengembangan Produk

Suatu produk barang tertentu akan dapat bersaing dengan produk yang sejenis maupun produk lainnya adalah apabila produk barang tersebut mempunyai kekhasan atau keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembelinya. Untuk menciptakan suatu produk yang unik membutuhkan suatu inovasi pengembangan produk yang berbeda dengan produk lain agar dapat diterima bahkan diminati oleh para konsumen. Selama ini, salah satu kendala bagi para pengrajin adalah pada pengembangan produk kerajinan, karena selera konsumen dari massa ke massa terus mengalami perubahan.

Dengan demikian, diversifikasi produk sangat penting untuk mempertahankan bahkan untuk meningkatkan pangsa pasar produk kerajinan. Sementara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melalui upaya pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas pengembangan pengolahan produk kerajinan secara intensif. Di samping itu, untuk pengembangan produk secara lebih lanjut dibutuhkan bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurnalis Radar Banyuwangi, mengungkapkan bahwa salah satu kendala pengrajin selama ini adalah pengadaan bahan baku. Kain bahan batik masih di datangkan dari luar Banyuwangi karena di Banyuwangi tidak ada pabrik tekstil.

Hambatan-hambatan yang paling menonjol dalam pengembangan industri kreatif adalah masalah hubungan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, di mana hubungan antara kedua belah pihak masih kurang efektif, terutama pada pengambilan keputusan yang masih bersifat sentralis di tingkat pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha pada akhirnya lebih memilih untuk mengembangkan usaha masing-masing. Hambatan lain, yang tidak kalah penting adalah masalah pengembangan produk atau diversifikasi produk kerajinan. Hal ini disebabkan karena pesaing dari daerah lain juga terus mengembangkan ide-ide untuk mengembangkan produk kerajinan yang mempunyai produk unik agar lebih disukai oleh konsumen luar negeri.

E. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pengembangan Industri Kreatif

Keberhasilan pengembangan industri kreatif sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi. Faktor yang mendukung tersebut seperti kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik kemampuan teknis maupun kemampuan desain inovasi. Selain itu, dari segi permodalan juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi industri kerajinan di Kabupaten Banyuwangi. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi menurut Kasi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan Disperindagtam Kabupaten Banyuwangi (2016) meliputi kapasitas SDM baik kemampuan teknis maupun kemampuan desain inovasi. Secara teknis kemampuan pengolahan kerajinan oleh pengrajin masih harus diperbaiki baik dari segi pengolahan awal dari bahan mentah sampai pada proses pewarnaan. Untuk keterampilan tangan, para pengrajin sudah diakui terampil karena para pengrajin sudah mampu membuat desain sendiri menurut pesanan dan pelatihan serta study banding ke daerah lain sehingga kemampuan membuat produk kerajinan sampai saat ini masih bagus. Hanya saja untuk pembuatan desainnya masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Faktor yang kedua adalah dari segi permodalan. Permodalan digunakan untuk mendukung produksi yang besar berdasarkan pesanan yang diterima. Kadangkala apabila ada permintaan atau pemesanan barang yang sangat banyak, para pengrajin mengalami kesulitan karena sebagian pengrajin juga mempunyai pekerjaan lain di luar usaha kerajinan tersebut. Dengan demikian, permodalan yang cukup sangat mendukung kelancaran proses produksi industri kerajinan khususnya untuk membeli peralatan atau mesin-mesin pemotong agar mampu memproduksi dalam skala besar dan meningkatkan kualitas produksi.

Di sisi lain kesepahaman di antara aktor-aktor dalam pembangunan, termasuk pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan sehingga dibutuhkan strategi untuk mengembangkan industri kerajinan tersebut melalui keterlibatan aktor-aktor tersebut. Dari pemerintahan dengan melibatkan dari berbagai SKPD mungkin dari Bappeda bagian perekonomian, juga dinas perindustrian. Mungkin nanti promosinya kita juga harus banyak bekerja sama dengan pihak swasta, trus permodalannya harus banyak berhubungan dengan perbankan. Untuk pemasarannya harus terlibat banyak dan serta ikut pameran. Dengan dilibatkan di pameran-pameran di Jakarta, Surabaya dan di Jogjakarta. Seperti yang biasa

dilakukan pameran oleh Disperindagtam, kemudian bagian perekonomian bersama-sama dengan Bappeda.

PENUTUP

Memperhatikan hasil analisis dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penetapan tujuh sektor dari 16 subsektor industri kreatif belum diiringi upaya penyiapan yang sistemik, khususnya pada tataran regulasi, infrastruktur penunjang, dan basis data. Hanya beberapa desa dan kecamatan yang masyarakatnya telah melakukan pendataan terhadap industri kreatif yang berkembang di wilayahnya.
2. Kehadiran industri kreatif sebagai wujud ide kreatif-inovatif masyarakat dan manfaat keekonomiannya, belum mampu menstimulasi desa dan kecamatan untuk segera merespon melalui pengaturan dan penataan saerta pengembangan usaha dan produk-produk kreatif yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kemanfaatannya dapat langsung dirasakan masyarakat.
3. Diversifikasi budaya dan potensi wilayah yang spesifik dan sangat variatif telah mendorong masyarakat untuk melakukan usaha usaha dan menghasilkan produk-produk kreatif. Hanya saja, masyarakat belum melakukan upaya yang lebih membumi untuk mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayahnya, sehingga dapat menstimulasi lahirnya kewirausahaan lokal yang berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan turut memicu daya saing daerah, bahkan nasional. Berbagai pembenahan dan penataan ekonomi kreatif menjadi kebutuhan yang harus segera dilakukan. Komitmen dan tindakan Pemerintah harus didasari aspirasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan ekonomi kreatif. Di sisi lain, apresiasi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan daya saing daerah melalui ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-dasar ekonomi wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- . (2008). *Ekonomi archipelago*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad, Lincolin. (1997). *Ekonomi pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Conyers dan Hill Diana. (1994). *Perencanaan sosial di dunia ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ghalib, Rusli. (2005). *Ekonomi regional*. Bandung : Pustaka Ramadhan
- Kartasmita, Ginanjar. (1997). *Administrasi pembangunan: Perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta:LP3ES
- . *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Nurzaman, Siti Sutriah. (2002). *Perencanaan wilayah di Indonesia pada masa sekitar krisis*. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Riggs, Fred W. (1989). *Administrasi pembangunan, sistem administrasi dan birokrasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedjatmoko. (1983). *Dimensi manusia dalam pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Siagian, Sondang P. (1983). *Adminsitras pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Gunung Agung
- Sjafrizal, (2008). *Ekonomi regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Universitas Andalas
- Soeparmoko. (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta

- Suhardjo, Sussongko. (2006). *Pembangunan daerah mendorong pemda berjiwa bisnis*. Jakarta: Penta Rei
- Soehartono, Irawan. (1995). *Metode penelitian sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Tarigan, Robinson. (2002). *Perencanaan pembangunan wilayah: Pendekatan ekonomi dan ruang*. Medan: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1990). *Pengantar administrasi pembangunan*. Cetakan Ketigabelas. Jakarta: LP3ES .
- Tambunan, Tulus. (2006). *Upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah*. Jakarta: Kamar Dagang Indonesia Jetro-2006
- Wirutomo, dkk. (2003). *Paradigma pembangunan di era otonomi daerah*. Jakarta: CV. Cipruy
- Jurnal, Makalah, Tesis, Skripsi, dan Laporan Penelitian**
- Haris S, Asep dan Setiawan, Odih. (2005). Pertumbuhan empat jenis pandan (*pandanus sp.*) sebagai tanaman sela di antara kelapa. *Buletin Teknik Pertanian Vol. 10. No. 2, 2005*
- Hilmi, M. (2011). *Pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sektor pertanian belimbing di Kota Depok tahun anggaran 2008/2009* (skripsi). Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Martosudirjo, Agus W. (2003). *Pengembangan usaha sabut kelapa*. Makalah diterbitkan pada prosiding Seminar Nasional Tahunan Perteta: Pengembangan Inkubator Agrobisnis Berbasis Teknologi Tepat Guna, Subang, 2003. Peneliti B2P TTG LIPI Subang
- Nursuhartinah, Sri. (2002). *Analisa potensi ekonomi daerah dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan dalam mendukung otonomi (studi kasus)* (laporan penelitian), Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Jakarta.
- Rahayu, Sri E dan Handayani, Sri. (2010). Keragaman genetik pandan asal Jawa Barat berdasarkan penanda inter simple sequence repeat. *Makara, Sains, Vol. 14, No.2, November 2010:158-162*
- Susiarti, Siti dan Rahayu, Mulyati. (2010). Kajian etnobotani pandan samak (*Pandanus tectorius Sol.*) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *Berita Biologi 10 (1)-April 2010*. Bogor: LIPI Cibinong
- Wijaya, Bayu dan Atmanti, Hastarini Dwi. (2006). Analisis pengembangan wilayah dan sektor potensial guna mendorong pembangunan di Kota Salatiga. *Dinamika Pembangunan Vol.3 No.2, Desember 2006:101-118*.
- Winarni, Ina. (2009). Pemanenan dan pengolahan pandan secara tradisional. *Buletin Hasil Hutan Vol.15 No.1, April 2009:9-16*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.
- Dokumen Daerah, Artikel, Internet, Majalah, Media Massa Bappeda**
- Kabupaten Banyuwangi. 2013. Banyuwangi Dalam Angka 2003
- . 2014. Banyuwangi Dalam Angka 2014
- . 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi 2016
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016
- Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021
- Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Banyuwangi 2016-2021
- Data Potensi Sentral Industri Mikro Kecil Menengah Menurut Lokasi Kecamatan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Banyuwangi 2015